



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSMARIZA
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 66552

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** 2.995.865.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.415.900.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/50 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 322.465.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 717.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** 206.000.000

1. MOBIL, HONDA, BUKAN HARTA BARU, SDH LAPOR 2016 CRV
Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** 579.954.000

D. SURAT BERHARGA **Rp.** ----

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** 1.214.180.363

F. HARTA LAINNYA **Rp.** ----

Sub Total **Rp.** 4.995.999.363

III. HUTANG **Rp.** ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** 4.995.999.363

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.